



**JURNAL  
AKUNTANSI DAN GOVERNANCE ANDALAS**

Laman Jurnal : [www.jaga.unand.ac.id](http://www.jaga.unand.ac.id)  
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas  
ISSN (Print) 2442-2363 | ISSN (Online) .....

**JAGA**  
Jurnal Akuntansi & Governance Andalas

## **Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening**

**Mugi Wismoyo Aji<sup>a</sup>, Hasan Mukhibad<sup>b</sup>.**

<sup>a</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, [mugiwismoyo@gmail.com](mailto:mugiwismoyo@gmail.com)

<sup>b</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang,  
[hasanmukhibad@mail.unnes.ac.id](mailto:hasanmukhibad@mail.unnes.ac.id)

---

### **INFORMASI ARTIKEL**

#### **Sejarah artikel:**

Diterima: 13 Februari 2020

Diterima revisian: 1 April 2020

Diterima publikasi: 1 Juni 2020

#### **Kata Kunci:**

*Financial Performance of Local Governments;*

*Local Own-Source Revenue;*

*Capital Expenditur;*

*Effectiveness Ratio.*

---

### **ABSTRAK**

*The purpose of this study is to determine whether there is an influence of local own-source revenue (PAD), regional loans, and intergovernmental revenue on the financial performance of local governments and their influence if mediated by capital expenditure. The population in this study is the Regency / City Governments in Central Java consisting of 29 Regencies and 6 Cities in 2014-2016. This study uses secondary data in the form of a report on the realization of the Central Java Regional Government Budget in 2014-2016. Hypothesis testing in this study uses path analysis with two regression models. The results of the research for the first regression model show that regional original income and the Intergovernmental Revenue have a significant effect on capital expenditure. The Regional Loan variable has no significant effect on capital expenditure. For the second regression model of regional own-source revenue and the Intergovernmental Revenue does not have a significant effect on financial performance, the regional loan variable has a significant effect on the financial performance of regional governments. Variable of local original income, regional loans, and intergovernmental revenue have no significant effect on the financial performance of local governments through capital expenditure. Intervening variables are not proven to be able to mediate the effect of independent variables on the dependent.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat istilah ini sering disebut dengan otonomi daerah.

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan daerah sesuai dengan potensi lokal wilayahnya (Minarsih, 2015). Kedudukan pemerintah daerah terutama tingkat II (Kabupaten/Kota) dalam sistem otonomi daerah penting karena akan berperan sebagai motor dalam pelaksanaan otonomi. Pemerintah daerah yang menguasai daerah yang lebih sempit daripada pemerintah pusat diharapkan sangat memahami kondisi dan permasalahan wilayahnya secara detail. Dengan demikian pembangunan daerah diharapkan akan berjalan dengan baik dan merata sampai pada wilayah-wilayah daerah.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibanding dengan era sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan menghasilkan pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah. Aspek kedua yaitu disisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah.

*Gap phenomena* pada penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah Jawa Tengah sangatlah rendah, hal ini dibuktikan dengan data pada laporan keuangan yang telah di audit oleh BPK pada penerimaan pendapatan asli daerah yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Begitu pula dengan nilai transfer dari pemerintah pusat atau dana perimbangan. Dana perimbangan provinsi Jawa Tengah sangatlah besar hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian provinsi Jawa Tengah sangatlah rendah atau masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Penelitian dengan topik kinerja keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan. Ketidaksamaan terhadap hasil penelitian sudah sering terjadi. Seperti penelitian (Julitawati, Darwanis, & Jalaluddin, 2012), yang menemukan bahwa pendapatan asli daerah dan *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Penelitian lain oleh (Minarsih, 2015), yang menemukan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan

*intergovernmental revenue*, dan pinjaman daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kusumawardani (2012), membuktikan bahwa pendapatan asli daerah dan pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Surepno (2013), menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Wandira, 2013)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel pendapatan asli daerah, *intergovernmental revenue*, pinjaman daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui variabel belanja modal. Orisinalitas pada penelitian ini yaitu pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah, *intergovernmental revenue*, pinjaman daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah. Penggunaan variabel-variabel tersebut didasarkan pada inkonsistensi hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya.

*Grand Theory*, penelitian ini menggunakan dua teori utama yaitu teori *stakeholder* dan teori *stewardship*. Teori *Stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan (dalam hal ini pemerintah daerah) bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* (dalam hal ini masyarakat dan pemerintah pusat). Teori *Stakeholder* ini digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* yaitu masyarakat. Teori ini juga menjelaskan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* yaitu pemerintah pusat. Teori *stewardship* menyatakan bahwa manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini menjelaskan hubungan pengaruh pinjaman daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan mengelola pinjaman daerah secara amanah sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah daerah menggunakan pinjaman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah dituntut untuk mensejahterahkan masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi sektor publik. Nordiawan (2010), mengatakan bahwa organisasi sektor publik bukan untuk mencari keuntungan melainkan kesejahteraan masyarakat.

### **H<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.**

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor publik pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2009). Berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diterima.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber APBD selain dana perimbangan. Pendapatan asli daerah digunakan pemerintah daerah untuk merealisasikan belanja modal. Nuarisa (2013), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Belanja modal mempunyai pengaruh penting dalam hal pelayanan publik karena masa manfaatnya sangat panjang. Masyarakat puas terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah akan ikut meningkat.

## **H<sub>2</sub> : Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap belanja modal.**

*Intergovernmental revenue* atau disebut juga dana perimbangan merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada daerah berpengaruh terhadap besarnya belanja modal. dana perimbangan merupakan salah satu pendapatan daerah yang menjadi faktor besarnya belanja daerah. Herman (2015) menyatakan bahwa pendapatan daerah dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha mandiri daerah atau disebut pendapatan asli daerah dan transfer dari pemerintah pusat yang disebut dana perimbangan. Dana dari pemerintah pusat kemudian dikelola oleh pemerintah daerah yang kemudian digunakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Besarnya dana perimbangan tentu berpengaruh dengan kelancaran pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. *Intergovernmental revenue* atau disebut juga dana perimbangan merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada daerah berpengaruh terhadap besarnya belanja modal. Dana perimbangan merupakan salah satu pendapatan daerah yang menjadi faktor besarnya belanja daerah. Herman (2015) menyatakan bahwa pendapatan daerah dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha mandiri daerah atau disebut pendapatan asli daerah dan transfer dari pemerintah pusat yang disebut dana perimbangan. Dana dari pemerintah pusat kemudian dikelola oleh pemerintah daerah yang kemudian digunakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Besarnya dana perimbangan tentu berpengaruh dengan kelancaran pembangunan infrastruktur di daerah-daerah.

### **H<sub>3</sub> : Pengaruh Pinjaman Daerah terhadap belanja modal.**

Salah satu sumber belanja daerah yaitu dari pinjaman daerah. Pinjaman daerah merupakan aktiva yang diperoleh dari kreditur yang digunakan untuk menunjang kinerja pemerintah daerah yang akan menimbulkan kewajiban untuk mengembalikannya di masa mendatang. Pemerintah pusat memberi kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman, namun dengan ketentuan-ketentuan dan pengawasan ketat dari pemerintah pusat. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah. Pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal dikarenakan jumlah pinjaman daerah relatif sedikit dari tahun ke tahun. Pinjaman daerah bukan merupakan sumber utama untuk membiayai belanja modal.

### **H<sub>4</sub> : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.**

Pendapatan asli daerah merupakan sebuah tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menghimpun sumberdaya atau kekayaan yang dimiliki daerah itu sendiri (Surepno, 2013). Apabila suatu daerah memiliki PAD yang tinggi, daerah tersebut tidak akan terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Namun ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat saat ini masih sangat besar. Hal ini membuat pemerintah daerah belum bisa mandiri dalam melakukan kinerjanya. Ketergantungan ini akan berdampak pada kualitas kinerja pemerintah daerah dan menjadikan pemerintah daerah sulit berkembang karena kurang mengeksplorasi sumber daya yang ada pada daerah tersebut yang bisa saja memiliki potensi-potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Suharjo dkk. (2010) mengungkapkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat sekitar 80%-98% dari APBD. PAD merupakan sumber pendapatan internal pemerintah daerah saat ini cukup memberikan kontribusi meskipun masih kecil. Daerah yang memiliki PAD tinggi menggambarkan tingkat kemakmuran yang tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Menurut Saragih (2003) peningkatan nilai PAD dari sebuah daerah merupakan indikator tumbuhnya perekonomian sebuah daerah. Penelitian mengenai PAD telah banyak dilakukan diantaranya adalah Surepno (2013) yang menjelaskan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian mengenai PAD juga dilakukan oleh Minarsih (2015) dengan hasil penelitian PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari beberapa penelitian sebelumnya masih terdapat perbedaan terhadap hasil penelitian, hal ini yang melatarbelakangi peneliti ini untuk melakukan pengujian kembali.

**H<sub>5</sub> : Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.**

*Intergovernmental revenue* atau dana perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu, untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat akan mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, adanya kewajiban pemerintah pusat kepada daerah masih sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah sehingga diperlukan dana perimbangan untuk mempercepat pembangunan daerah. Apabila masyarakat terlayani dengan baik, maka masyarakat akan memberikan *feedback* (umpan balik) yang positif. Dengan demikian kinerja keuangan pemerintah daerah akan ikut meningkat. Retnowaty, (2015) yang melakukan penelitian terkait kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2013, menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**H<sub>6</sub> : Pengaruh Pinjaman Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah**

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Konsep dasar pinjaman daerah untuk memberikan alternatif sumber pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apabila pemerintah daerah memiliki utang yang besar memiliki kinerja yang buruk karena sumber pendanaan utamanya berasal dari pihak eksternal (Perwitasari, 2010). Penelitian ini konsisten dengan penelitian Sumarjo (2010) bahwa pinjaman daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. begitu pula dengan penelitian Minarsih, (2015) pinjaman daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016 Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang melaporkan kinerja keuangan dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2014-2016, yang berjumlah 102 kabupaten dan

kota. Teknik pengambilan sampel menggunakan *pusposive sampling* dimana kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.** Pengambilan Sampel

| No. | Kriteria Sampel                                                                  | Tidak Memenuhi Kriteria | Memenuhi Kriteria |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1.  | Pemerintah daerah yang mempublikasikan laporan keuangannya pada tahun 2014-2016. |                         | 37                |
| 2.  | Memiliki informasi berkaitan dengan variabel-variabel yang diukur.               | (3)                     | 34                |
|     | Jumlah watu penelitian                                                           |                         | 3                 |
|     | Total Unit Analisis                                                              |                         | 102               |

Sumber: Berbagai sumber yang diolah (2019)

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah, *intergovernmental revenue*, pinjaman daerah. Variabel *intervening* dalam penelitian ini yaitu belanja modal. Definisi operasional variabel dijelaskan pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Definisi Operasional

| Variabel                    | Definisi Operasional                                                                                                                | Pengukuran                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah (X1) | Semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran.           | Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah |
| Pinjaman Daerah (X2)        | Sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. | <i>Debt/Equity</i>                                                                                           |

|                                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Intergovernmental Revenue (X3)</i> | Pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali | Total dana perimbangan/Total Pendapatan                                                                                         |
| Belanja Modal (Y1)                    | Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.     | Belanja Tanah+Belanja Peralatan dan Mesin+ Belanja Gedung dan Bangunan+Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan+belanja Aset Lainnya |
| Rasio Efektivitas (Y2)                | Perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dan penerimaan daerah.                                       | Realisasi Penerimaan PAD/ Target Penerimaan PAD                                                                                 |

Teknik pengambilan data penelitian ini adalah teknik dokumentasi karena data penelitian ini merupakan data sekunder. Data dalam penelitian ini berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2014-2016 yang tersedia di *website* resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Cara memperoleh data tersebut dengan mengunduh pada *website* resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id).

Alat data menggunakan *IBM SPSS Statistics 21*. Metode analisis untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah statistik deskriptif, analisis jalur, dan uji *sobel* dengan taraf signifikansi 5%. Sebagai bagian dari analisis regresi, metode tersebut perlu memenuhi persyaratan untuk lolos uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif menggambarkan nilai minimum, nilai maksimum, *mean*, dan nilai standar deviasi untuk setiap variabel dalam penelitian ini yaitu variabel pendapatan asli daerah ( $X_1$ ), pinjaman daerah ( $X_2$ ), *intergovernmental revenue* ( $X_3$ ), belanja modal ( $Y_1$ ), dan rasio efektivitas ( $Y_2$ ). Pada tabel statistik deskriptif dijelaskan mengenai sebaran data untuk masing-masing variabel, sebaran data dikatakan baik jika nilai *mean* lebih tinggi daripada standar deviasi dan sebaliknya. Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Analisis Statistik Deskriptif

|                       | N   | Minimum | Maximum | Mean    | Std. Deviation |
|-----------------------|-----|---------|---------|---------|----------------|
| PAD (X <sub>1</sub> ) | 102 | 25,69   | 28,03   | 26,2863 | 0,42258        |
| PD (X <sub>2</sub> )  | 102 | ,00     | 0,06    | 0,0070  | 0,00853        |
| IR (X <sub>3</sub> )  | 102 | 0,38    | 0,93    | 0,6252  | 0,07761        |
| BM (Y <sub>1</sub> )  | 102 | 23,76   | 27,66   | 26,3902 | 0,55491        |
| RE (Y <sub>2</sub> )  | 102 | 0,90    | 1,48    | 1,1342  | 0,10275        |
| Valid N (listwise)    | 102 |         |         |         |                |

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019)

Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dapat diketahui nilai *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) memiliki signifikansi sebesar  $0,200 > 0,005$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil uji multikolineritas dengan nilai  $\text{tolerance} > 0,10$  ( $X_1=0,882$ ,  $X_2=0,993$ ,  $X_3=0,886$ ,  $Y_1=0,667$ ). Dengan demikian, dapat disimpulkan tidak terjadi multikolineritas antar variabel bebas. Hasil dari uji heterokedastisitas menggunakan metode uji *park*. Nilai *absolute residual*  $> 0,05$  ( $X_1=0,163$ ,  $X_2=0,239$ ,  $X_3=0,484$ ,  $Y_1=0,913$ ). Dengan demikian, dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Hasil uji autokorelasi menggunakan metode uji *Durbin Watson* menunjukkan nilai DW sebesar

**Tabel 4.** Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis (Uji Statistik dan Uji Sobel)

| Hipotesis      | Pernyataan                                                                      | $\beta$ | $\alpha$ | Sig.  | t Hitung | t tabel | Hasil    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|----------|---------|----------|
| H <sub>1</sub> | Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal    | 0,605   | 0,05     | 0,000 | -        | -       | Diterima |
| H <sub>2</sub> | Intergovernmental revenue berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal | 0,196   | 0,05     | 0,029 | -        | -       | Diterima |
| H <sub>3</sub> | Pinjaman daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal           | -0,027  | 0,05     | 0,745 | -        | -       | Ditolak  |
| H <sub>4</sub> | Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan | -0,140  | 0,05     | 0,247 | -        | -       | Ditolak  |

|                |                                                                                                         |        |      |       |        |       |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|--------|-------|----------|
|                | pemerintah daerah                                                                                       |        |      |       |        |       |          |
| H <sub>5</sub> | Intergovernmental revenue berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah    | -0,184 | 0,05 | 0,068 | -      | -     | Ditolak  |
| H <sub>6</sub> | Pinjaman daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah              | -0,233 | 0,05 | 0,019 | -      | -     | Diterima |
| H <sub>7</sub> | Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui belanja modal    | -      | -    | -     | -0,701 | 0,667 | Ditolak  |
| H <sub>8</sub> | Intergovernmental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui belanja modal | -      | -    | -     | 0,042  | 0,667 | Ditolak  |
| H <sub>9</sub> | Pinjaman daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui belanja modal           | -      | -    | -     | 0,054  | 0,667 | Ditolak  |

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019)

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal**

Hasil uji t dan koefisien regresi menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal diterima. Pendapatan asli daerah untuk wilayah Jawa Tengah tergolong besar, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap belanja modal. Pemerintah daerah diberi kesempatan untuk membangun dan mengembangkan sendiri daerahnya. Dalam APBD dapat diketahui bahwa pendapatan yang diperoleh daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah. Belanja modal adalah salah satu langkah pemerintah daerah dalam bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat demi kelancaran aktivitas pemerintah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Kemampuan keuangan daerah ditunjukkan oleh kinerja keuangan, yang dapat

digunakan untuk mengukur keberhasilan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah pada provinsi Jawa Tengah mampu mengelola potensi dan menggali potensi yang ada. Oleh karena itu, pendapatan yang didapat sangatlah besar. Pendapatan daerah yang tinggi tentu berpengaruh terhadap jumlah belanja modal.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian (Ardhani, 2010) menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pengeluaran untuk alokasi belanja modal juga tinggi. Penelitian ini juga konsisten dengan penelitian (Priambudi, 2017) menyatakan semakin tinggi pendapatan asli daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan (dalam hal ini adalah pemerintah daerah) bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* (masyarakat dan pemerintah pusat). Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu mengalokasikan anggaran pendapatan daerah dengan baik, yaitu dengan belanja modal infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Belanja Modal**

*Intergovernmental revenue* berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan *intergovernmental revenue* berpengaruh belanja modal diterima. *Intergovernmental revenue* atau disebut juga dana perimbangan merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada daerah berpengaruh terhadap besarnya belanja modal. dana perimbangan merupakan salah satu pendapatan daerah yang menjadi faktor besarnya belanja daerah. Herman (2015) menyatakan bahwa pendapatan daerah dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha mandiri daerah atau disebut pendapatan asli daerah dan transfer dari pemerintah pusat yang disebut dana perimbangan. Dana dari pemerintah pusat kemudian dikelola oleh pemerintah daerah yang kemudian digunakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Besarnya dana perimbangan tentu berpengaruh dengan kelancaran pembangunan infrastruktur di daerah-daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan (pemerintah daerah) bukanlah entitas yang hanya beroperasi kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* (masyarakat dan pemerintah daerah). *Intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat telah digunakan dengan baik oleh pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal, yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Pengaruh Pinjaman Daerah terhadap Belanja Modal**

Pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan pinjaman daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal ditolak. Salah satu sumber belanja daerah yaitu dari pinjaman daerah. Pinjaman daerah merupakan aktiva yang diperoleh dari kreditur yang digunakan untuk menunjang kinerja pemerintah daerah yang pada masa akan datang akan ada kewajiban untuk mengembalikannya. Pemerintah pusat memberi kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman, namun dengan ketentuan-ketentuan dan pengawasan ketat dari pemerintah pusat. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah. Pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal dikarenakan jumlah pinjaman daerah relatif sedikit dari tahun ke tahun. Pinjaman daerah bukan merupakan sumber utama untuk membiayai belanja modal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa manajemen (dalam hal ini pemerintah daerah) tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (kesejahteraan masyarakat). Pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak mengandalkan utang sebagai sumber pendanaan utamanya, dimana pemerintah daerah akan terbebani oleh pelunasan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu bertindak secara amanah dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan publik dengan tidak mengandalkan utang.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pendapatan asli tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ditolak. Peningkatan pendapatan asli daerah akan berdampak pada meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam pemilikan potensi, penggalan, dan pengelolaan potensi yang baik sehingga semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan yang bersih yang berhak diakui pemerintah daerah yang mana pemerintah daerah berwenang dan memiliki kebebasan dalam hal mengelola sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, maka menunjukkan kemampuan suatu daerah mengelola dan optimalisasi potensi dan sumber pendapatan suatu daerah tersebut sehingga akan memaksimalkan penerimaan

penerimaan pemerintah daerah yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. Pada penelitian ini pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dikarenakan pendapatan asli daerah di Jawa Tengah tergolong rendah sehingga tidak memberikan dampak yang terlalu signifikan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Minarsih (2015) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian ini konsisten dengan penelitian Andirfa (2016) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah belum efektif.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan (pemerintah daerah) bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri melainkan bertanggung jawab terhadap *stakeholder* (masyarakat dan pemerintah pusat). Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena pengalokasian dana untuk pembangunan infrastruktur yang kurang maksimal.

### **Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

*Intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis kelima yang menyatakan *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ditolak. *Intergovernmental revenue* atau dana perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu, untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat akan mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, adanya kewajiban pemerintah pusat kepada daerah masih sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah sehingga diperlukan Dana Perimbangan untuk mempercepat pembangunan daerah.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Retnowaty, (2015) yang melakukan penelitian terkait kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2013, menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan (pemerintah daerah) bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan

sendiri melainkan bertanggung jawab terhadap *stakeholder* (masyarakat dan pemerintah pusat). *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian dana untuk pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang maksimal.

### **Pengaruh Pinjaman Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pinjaman daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis keenam yang menyatakan pinjaman daerah berpengaruh positif signifikan diterima. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Konsep dasar pinjaman daerah untuk memberikan alternatif sumber pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apabila pemerintah daerah memiliki utang yang besar memiliki kinerja yang buruk karena sumber pendanaan utamanya berasal dari pihak eksternal (Perwitasari, 2010).

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Sumarjo (2010) bahwa pinjaman daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. begitu pula dengan penelitian Minarsih, (2015) pinjaman daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Pinjaman daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjadi suatu lembaga yang dapat dipercaya, membuat pertanggungjawaban keuangan maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari pinjaman daerah telah digunakan dengan baik dan sesuai harapan.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Modal**

Hipotesis ketujuh dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui belanja modal. Hasil uji sobel menunjukkan bahwa belanja modal tidak berhasil memediasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dengan demikian hipotesis ketujuh yang menyatakan pendapatan asli daerah

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui belanja modal ditolak.

Pemerintah daerah menggunakan pendapatan asli daerah untuk pembangunan dan perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan, transportasi. Pembangunan sarana prasarana akan memudahkan segala kegiatan masyarakat. Apabila pemerintah daerah menggunakan pendapatan asli daerah dengan baik sesuai dengan proporsinya, maka tingkat efektivitas pemerintah daerah juga akan naik. Hal ini akan berpengaruh juga terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja modal tidak berhasil memediasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah karena koefisien pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah lebih besar dari pada koefisien pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Modal. Hal ini dikarenakan pengalokasian anggaran pendapatan asli daerah yang belum sesuai dengan proporsinya. Pengaruh langsung yang lebih signifikan mengakibatkan peran Belanja Modal tidak nampak pada hasil penelitian ini.

### **Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Modal**

Hipotesis kedelapan dalam penelitian ini adalah *Intergovernmental Revenue* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui belanja modal. Hasil uji sobel menunjukkan bahwa belanja modal tidak berhasil memediasi pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dengan demikian hipotesis kedelapan yang menyatakan *Intergovernmental Revenue* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui belanja modal ditolak.

Alokasi pembiayaan belanja modal sebagian besar berasal dari dana perimbangan (*intergovernmental revenue*). Dana perimbangan diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berguna untuk pembangunan sarana prasarana. Apabila pemerintah daerah mampu mengalokasikan anggaran tersebut, maka pembangunan ekonomi di daerah akan meningkat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 112/PMK.07/2017, pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal 25 persen dana transfer umum untuk pembangunan infrastruktur.

Belanja modal tidak berhasil memediasi pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah karena koefisien pengaruh langsung *Intergovernmental*

*Revenue* lebih besar dari pada koefisien pengaruh tidak langsung *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Modal. Hal ini dikarenakan dana transfer yang dilaokasi untuk belanja modal belum sesuai dengan persentase yang diharapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar 25 persen. Pengaruh langsung yang lebih signifikan mengakibatkan peran Belanja Modal tidak nampak pada hasil penelitian ini.

### **Pengaruh Pinjaman Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Modal**

Hipotesis kesembilan dalam penelitian ini adalah Pinjaman Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui belanja modal. Hasil uji sobel menunjukkan bahwa belanja modal tidak berhasil memediasi pengaruh Pinjaman Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dengan demikian hipotesis kesembilan yang menyatakan Pinjaman Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui belanja modal ditolak.

Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD dan solusi menutup kekurangan kas daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan untuk kepentingan daerah seperti kegiatan-kegiatan pendukung pertumbuhan ekonomi, kegiatan-kegiatan untuk layanan masyarakat, dan lain sebagainya dengan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai batas waktu yang telah ditentukan (Marudino, 2017). Belanja modal adalah salah satu faktor penentu baik atau tidak baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara efektif, maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat.

Belanja modal tidak berhasil memediasi pengaruh ketiga hubungan variabel independen terhadap dependen, termasuk Pinjaman Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah karena koefisien pengaruh langsung Pinjaman Daerah lebih besar dari pada koefisien pengaruh tidak langsung Pinjaman Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Modal. Pengaruh langsung yang lebih signifikan mengakibatkan peran Belanja Modal tidak nampak pada hasil penelitian ini. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa belanja modal tidak memiliki kemampuan untuk memperkuat atau memperlemah suatu hubungan variabel independen terhadap dependen, sehingga belanja modal tidak dapat dijadikan sebagai variabel intervening.

#### 4. SIMPULAN

Pendapatan asli daerah dan *intergovernmental revenue* berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sementara pinjaman daerah tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah dan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sementara pinjaman daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah, *intergovernmental revenue*, dan pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui belanja modal.

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dianggap belum bijak dalam melakukan pembiayaan belanja daerah. Pengeluaran daerah lebih diperuntukkan bagi belanja pegawai daripada belanja modal, dimana belanja modal digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardhani, P. (2010). *TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH ( Studi Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah )*, 1–29.
- Julitawati, E., Darwanis, & Jalaluddin. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 15–29.
- Minarsih, R. A. (2015). *Pengaruh size, wealth, leverage dan intergovernmental revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di jawa tengah*.
- Nuarisa, S. A. (2013). Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.15294/aa.v2i1.1163>
- Priambudi, W. (2017). UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN, VI(3).
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(33), 44–51. <https://doi.org/ISSN 2252-6765>
- Andirfa, Mulia. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Dan Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*
- Ardhani, Pungky. (2011). “Pengaruh Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Skripsi. Semarang : UNDIP

- Bungkes, Panetir & Nadir, Nadirsyah & Abdullah, Syukriy. (2016). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Sendiri Dan Penerimaan Pembiayaan Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintahan Kabupaten Kota di Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. 5. 50-59.
- Frelistiyani, Winda. (2010). “ Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening”. Skripsi. Semarang: UNDIP.
- Indrawan, M. Yusuf. (2013). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin Makasar.
- Julitawati, E., Darwanis, & Jalaluddin. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 15–29.
- Marudino, Randy. (2017). Pengertian dan Prosedur Pinjaman Daerah. Diakses 25 April 2018, dari <https://medium.com/@randruin/pengertian-dan-prosedur-pinjaman-daerah-896069e7c4ab> b
- Minarsih, Ratna Ayu. (2015). “Pengaruh *Size, Wealth, Leverage* dan *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah”. Skripsi. Semarang: Unnes.
- Nuarisa, S. A. (2013). Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.15294/aa.v2i1.1163>
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 112/PMK.07/2017 *Tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa*.
- Perwitasari, Citra. (2010). *The Influence of Financial Performance to the Level of Accountability Disclosure of Indonesia's Local Government*. Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Priambudi, Wimpi. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta
- Retnowati, Reny. (2015). Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta

- Ardhani, P. (2010). TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH ( Studi Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah ), 1–29.
- Julitawati, E., Darwanis, & Jalaluddin. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 15–29.
- Minarsih, R. A. (2015). *Pengaruh size, wealth, leverage dan intergovernmental revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di jawa tengah*.
- Nuarisa, S. A. (2013). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1163>
- Priambudi, W. (2017). UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN, VI(3).
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(33), 44–51. <https://doi.org/ISSN 2252-6765>
- Wijayanti, Dwi Wahyu. (2015). “ Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Empat Siklus Penganggaran. Skripsi : Unnes